



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**RENCANA KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**Kantor Terpadu Gedung Graha Bakti Praja  
Jalan Basuki Rahmat Lantai 1 dan 2**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 yang akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kami Rencana Kinerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program dibidang Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan berguna bagi kita semua.

Ponorogo, 28 September 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO



**drg. HI. RAHAYU KUSDARINI, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610510 198901 2 001

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
SK Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan .....	v
LAMPIRAN	
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5 Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	49
3.3 Program dan Kegiatan .....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	63
BAB V PENUTUP .....	66

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2020 Kabupaten Ponorogo .....	10
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo .....	21
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo .....	25
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo .....	48
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo .....	53
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	64



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4 /6993/ 405.09 / 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2021 dengan menuangkannya dalam suatu keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2021;
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- (2) Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan periode 1 (satu) tahun;
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan merupakan :

- (1) Penjabaran lebih lanjut atas tujuan dan sasaran Kepala Dinas Kesehatan yang telah dijabarkan melalui Rencana Strategis Tahun 2016-2021;
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan DPA Dinas Kesehatan;
- (2) Renja Dinas Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan program dan kegiatan kabupaten dengan Propinsi.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renja Perangkat Dinas Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - e. Bab V : Penutup.
- (2) Isi dan uraian Renja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 28 September 2020



drg. H. RAHAYU KUSDARINI, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610510 198901 2 001

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.4 / 6993 / 405.09 / 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2020**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
- c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2016-2021.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja OPD tahun 2021 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan

formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2016–2021 sebagai acuan dalam penyusunan Renja OPD tahun 2021 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Organisasi Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan.
- b. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2020 berpedoman kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- c. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja OPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja OPD tahun 2021 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
- c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
- p. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;
- q. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 157 Tahun 2019 tentang Reviu Kelima Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo disusun dengan maksud untuk menyatukan tujuan dan sasaran serta untuk memberi arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan untuk mendukung program kerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang akan okum dan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini dicapai dengan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemanfaatan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh okum informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta okum kesehatan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun agar terdapat kesesuaian dan keselarasan dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen harus dievaluasi dalam perencanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2020. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi OPD. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Anggaran Belanja untuk OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) tahun 2020 sebesar Rp. 61.113.130.000,00.

##### B. Belanja Langsung

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.523.405.697</b>
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	510.019.000
1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.930.792
1.3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	
1.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000
1.5	Penyediaan makanan dan minuman	175.000.000
1.6	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	87.846.273
1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	614.690.632
1.8	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.419.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>12.320.965.809</b>
2.9	Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	1.401.750.000
2.10	Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	120.176.700
2.11	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, peralatan dan perlengkapan gedung kantor	32.500.600
2.12	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	257.564.000
2.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	0
2.14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	10.508.974.509
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>29.221.000</b>
3.15	Bimbingan teknis / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang- undangan	29.221.000
3.16	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN	0
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>90.118.500</b>
4.17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	60.343.500
4.18	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	29.775.000
<b>5</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>4.830.148.400</b>
5.19	Perbaikan gizi masyarakat	50.000.000
5.20	Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	3.108.604.500
5.21	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesh olahraga	225.574.900
5.22	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pengembangan UKBM	1.445.969.000
5.23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)	0
5.24	Dukungan Manajemen BOK dan Jaminan Persalinan (DAK BOK)	0

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>6</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>1.393.916.200</b>
6.25	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	589.075.000
6.26	Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	658.671.200
6.27	Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kesehatan jiwa	146.170.000
<b>7</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1.741.870.000</b>
7.28	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.741.870.000
7.29	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	0
<b>8</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>15.545.401.517</b>
8.30	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	15.545.401.517
<b>9</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>6.785.437.000</b>
9.31	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yg bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	6.571.155.446
9.32	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/ rehabilitatif	214.281.554
9.33	Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dg BPJS	0
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>7.334.241.506</b>
10.34	Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	174.516.500
10.35	Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer	1.500.000
10.36	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	7.158.225.006
<b>11</b>	<b>Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan</b>	<b>13.978.710.991</b>
11.37	Kegiatan penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	6.829.864.727
11.38	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	6.807.573.764
11.39	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	341.272.500
<b>12</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)</b>	<b>78.214.106.538</b>
12.40	Penyelenggaraan BOK UKM	6.902.441.000
12.41	Penyelenggaraan pelayanan Labkesda	100.000.000
12.42	Penyelenggaraan pelayanan Gudang Farmasi	120.000.000
12.43	Penyelenggaraan Gudang Farmasi -Elogistik (DAK-BOK)	0
12.44	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	46.068.558.616
12.45	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	20.966.168.002

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
13	<b>Program Yanfar dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>0</b>
13.46	Pengadaan obat puskesmas, penyediaan bahan medis habis pakai puskesmas (DAK Reguler)	0
14	<b>Program Pelayanan Dasar</b>	<b>0</b>
14.47	Penyediaan sarana puskesmas non afirmasi (DAK Reguler)	0
14.48	Penyediaan alat kesehatan puskesmas non afirmasi (DAK Reguler)	0
15	<b>Program Penurunan Stunting</b>	<b>0</b>
15.49	Penyediaan obat gizi (vitamin A merah dan biru, tablet penambah darah ibu hamil, tablet penambah darah remaja putri dan mineral mix) (DAK Penugasan)	0
16	<b>Program Pengendalian Penyakit</b>	<b>0</b>
16.50	Penyediaan Cryotherapy, vaccine carrier, posbindu kit dan pengadaan bahan habis pakai pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Penugasan)	0
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>143.787.543.158</b>

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021, dimana program dan kegiatan tertuang dalam KUA PPAS Tahun 2019. Pada Tahun 2019 alokasi dana ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa





1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.03	<b>3. Program Peningkatan Displin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	a. Persentase ASN bidang kesehatan mengikuti Diklat/Bimbingan teknis / workshop / lokakarya sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	b. Persentase pejabat fungsional memenuhi angka kredit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.2 Bimbingan teknis / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan									
	3.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN									
1.02.01.03	<b>4. Peningkatan Displin Aparatur</b>	Persentase pegawai mendapatkan pakaian kerja	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1.02.01.05	<b>5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	a. Rasio dokter	1/62.000	1/62.000	-	-	-	-	-	-
		b. Rasio dokte gigi	1/289.605	1/289.605	-	-	-	-	-	-
		c. Rasio bidan	1/1.684	1/1.684	-	-	-	-	-	-
1.02.01.06	<b>6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80%	83%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
	6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD									
	6.2 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran / prognosis realisasi anggaran dan akhir tahun									
1.02.01.16	<b>7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	a. Persentase gizi buruk mendapat perawatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7.1 Perbaikan gizi masyarakat	b. Persentase K4	84.83%	86.42%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	7.2 Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	c. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	91.33%	93.17%	97%	97%	100%	98%	98%	100%
		d. Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	98.24%	99.12%	100%	100%	100%	50%	50%	100%
	7.3 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	e. Persentase pelayanan kesehatan pada usia	-	54%	58%	58%	100%	59%	59%	100%
		f. Persentase peserta KB aktif	-	54%	58%	58%	100%	74%	74%	100%
	7.4 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan & Pengembangan UKBM	g. Persentase rumah tangga ber-PHBS	50%	54%	70%	70%	100%	80%	80%	100%
	7.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)	h. % Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar Ber-PHBS	100%	55%	100%	100%	100%	41%	41%	100%
	7.6 Dukungan Manajemen BOK dan Jaminan Persalinan (DAK BOK)	i. % Pondok Pesantren yang Ber-PHBS	50%	54%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
		j. % posyandu PURI	50%	55%	70%	70%	100%	75%	75%	100%
		k. % desa siaga aktif	100%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		l. % penduduk yang akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	-	85%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
	m. % pos UKI di wilayah Kerja Puskesmas	50%	55%	70%	70%	100%	80%	80%	100%	
1.02.01.44.01	<b>8. Penurunan Stunting</b>	Persentase jumlah obat gizi terpenuhi sesuai rencana	-	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	8.1 Penyediaan obat gizi (vitamin A merah, vit A biru, TTD ibu hamil, TTD remaja putri dan mineral mix) (DAK Penugasan)									
1.02.01.19	<b>9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Persentase Desa Siaga Berstrata PURI	-	0%	-	-	-	-	-	-
1.02.01.20	<b>10. Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	Persentase gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1.02.01.21	<b>11. Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang	80%	80%	-	-	-	-	-	-
1.02.01.22	<b>12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	a. Persentase penderita HIV/AIDS mendapat ARV	74%	50%	76%	60%	79%	78%	78%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	12.1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	b. Succes rate pasien TB paru	86%	84%	88%	86%	98%	90%	90%	100%
	12.2 Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	c. Insiden rate penyakit DBD	<46/ 100.000	<46/ 100.000	<47/ 100.000	>47/ 100.000	78%	<48/ 100.000	<48/ 100.000	100%
	12.3 Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan	d. RFT rate kasus kusta	PB 100% MB 95%	PB 100% MB 96%	PB 100% MB 95%	PB 100% MB 98%	99%	PB 100% MB 95%	PB 100% MB 95%	100%
		e. Cakupan penderita hipertensi diobati	30%	0%	30%	22%	73%	30%	30%	100%
		f. Cakupan penderita diabetes diobati	30%	0%	30%	13%	43%	30%	30%	100%
		g. Persentase pasien ODGJ pasung diobati	100%	70%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
		h. Persentase KLB ditangani <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		i. Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j. Persentase imunisasi dasar lengkap	93%	90%	93%	91%	98%	93%	93%	100%
1.02.01.45	<b>13. Program Pengendalian Penyakit</b>	Persentase pengadaan alat dan bahan medis habis pakai pengendalian penyakit terpenuhi	-	0%	-	-	-	-	-	-
	13.1 Penyediaan Cryotherapy, vaccine carrier, posbindu kit dan pengadaan BHP pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Penugasan)									
1.02.01.23	<b>14. Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	a. Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar	29%	29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14.1 Akreditasi Puskesmas (DAK)	b. Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	50%	50%	-	-	-	50%	50%	100%
	14.2 Akreditasi Labkesda (DAK)	c. % puskesmas te-reakreditasi	-	0%	16%	16%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase labkesda terakreditasi	-	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	21.2 Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif	b. Persentase kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif / rehabilitatif dilaksanakan sesuai rencana	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	21.3 Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada faskes yang bekerjasama dgn BPJS	c. Persentase diklat, bimtek, workshop dilaksanakan sesuai rencana	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	21.4 Penyediaan/ Pemeiharaan Saryankes bagi Masy yg Terkena Penyakit Akibat dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya									
1.02.01.39	<b>22. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan</b>	a. Persentase Puskesmas dengan nilai pemantauan standar 80%	-	30%	40%	40%	100%	90%	90%	100%
		b. Persentase klinik yang mendapat rekomendasi ijin operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	22.1 Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	c. % unit layanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar - Puskesmas - Rumah Sakit - Fasyankes lainnya	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	22.2 Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer	d. % Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	-	15%	20%	20%	100%	100%	100%	100%
	22.3 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	e. Persentase Klinik Tradisional yang terstandar	-	0%	20%	20%	100%	30%	30%	100%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	25.4 Penyelenggaraan pelayanan Labkesda	d. Persentase kegiatan pelayanan labkesda dilaksanakan sesuai rencana	95%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	25.5 Penyelenggaraan pelayanan gudang farmasi	e. Persentase kegiatan gudang farmasi dilaksanakan sesuai rencana	-	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	25.6 Penyelenggaraan Gudang Farmasi Elogistik (DAK BOK)	f. Persentase kegiatan distribusi obat dan elogistik dilaksanakan sesuai rencana	-	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Ponorogo termasuk dalam wilayah administratif Propinsi Jawa Timur terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan dan 281 desa. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan serta sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah). Kondisi geografis dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki tolak ukur serta indikator yang lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasi.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2020 sampai dengan Tribulan II, diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	96,79	47.5	Baik
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	22,13	7.4	Baik
3	% Balita gizi buruk	1.7%	55.04%	Kurang
4	Prevalensi Balita Stunting	24,80%	17.48%	Baik
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	79,04	Cukup
6	% Puskesmas terakreditasi	100%	100%	Baik
7	% Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	16%	6.4%	Kurang
8	CFR HIV/AIDS	17 %	0%	Baik
9	CFR TB paru per 100.000 penduduk	2	0%	Baik
10	Persentase Desa Bebas DBD	12%	13.2%	Baik
11	Proporsi penderita kusta anak	< 5%	0%	Baik
12	Persentase pasien ODGJ bebas pasung	74%		
13	Persentase Desa UCI	85%	62%	Kurang

Dari tabel capaian kinerja di atas belum bisa dilakukan analisa karena masih sampai dengan tribulan II sehingga belum menggambarkan kinerja sesungguhnya. Terlebih lagi dengan adanya pandemi *Corona Virus 2019 (Covid-19)* di Tahun 2020, semakin memperberat kerja pelayanan kesehatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan 2016-2021. Terdapat perubahan yang signifikan, baik perubahan rencana kerja

tahunan maupun refocusing anggaran. Fokus kegiatan tahun 2020 diarahkan untuk penanganan Covid-19 ini mulai dari kegiatan pelacakan kasus sampai dengan pengobatan pasien terkonfirmasi Covid-19.

Hal ini bukan berarti tugas memberikan pelayanan bermutu bagi masyarakat terhenti, apalagi salah satu pilar utama program Indonesia sehat adalah JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Dengan puskesmas sebagai PPK-BLUD dimana puskesmas bisa mengelola keuangannya secara mandiri dan fleksible serta puskesmas terakreditasi, hal ini diharapkan semakin meningkatkan mutu akses puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi masyarakat, sehingga tujuan Dinas Kesehatan yaitu *meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan* dalam mendukung misi ke-7 pemerintah daerah yaitu "Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian" dapat tercapai sesuai dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.

**Tabel TC 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Ponorogo**

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2020	2021	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	96.79	96.99	96.89	96.79	96.79	103.00	96.89	96.79	96.79	Terpenuhi
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	22.13	23.87	23	22.13	22.13	12.00	23	22.13	22.13	Terpenuhi
3	% balita gizi buruk	-	2%	2%	1.9%	1.7%	1.70%	0.62%	1.9%	1.7%	1.7%	Terpenuhi
4	Prevalensi balita stunting	<20%	25%	25%	24.8%	24.8%	24.8%	17.8%	24.8%	24.8%	24.8%	Terpenuhi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	84	80	82	84	84	79	82	84	84	Terpenuhi
6	% puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhi
7	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	16%	13%	16%	16%	16%	22%	16%	16%	16%	Terpenuhi
8	CFR HIV/AIDS	-	17%	18%	17%	17%	17%	21%	17%	17%	17%	Terpenuhi
9	CFR TB paru per 100.000 pddk	-	2	2	2	2	2	5	2	2	2	Terpenuhi

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2020	2021	
10	Persentase Desa Bebas DBD	-	12%	8%	10%	12%	12%	1%	10%	12%	12%	Terpenuhi
11	Proporsi penderita kusta anak	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	3%	< 5%	< 5%	< 5%	Terpenuhi
12	Persentase pasien ODGJ bebas	-	74%	70%	72%	74%	74%	68%	72%	74%	74%	Terpenuhi
13	Persentase Desa UCI	85%	85%	85%	85%	85%	85%	80%	85%	85%	85%	Terpenuhi

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis pada urusan kesehatan di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Terjadinya pandemi global *Corona Virus 2019* (Covid-19) sehingga Bupati Ponorogo menetapkan status tanggap darurat penanganan Covid-19 sebagai prioritas utama kinerja bidang kesehatan.
2. NEW NORMAL di masyarakat mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaannya.
3. Optimalisasi penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui integrasi Jamkesda (PBI APBD) dengan BPJS JKN (PBI APBN).
4. Setiap tahun masih ditemukan kasus gizi buruk di masyarakat.
5. Masih tingginya kasus balita stunting di Ponorogo.
6. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan adanya kecenderungan peningkatan kesakitan dan kematian karena penyakit degeneratif/penyakit tidak menular.
7. Masih tingginya kejadian bencana, kecelakaan dan kejadian luar biasa (KLB).
8. Dengan puskesmas menjadi PPK-BLUD ketersediaan sumber daya kesehatan baik SDM maupun sarana prasarana masih kurang dari standar.
9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan

Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 didasarkan kepada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Program dan kegiatan Tahun 2021 mengalami perubahan kuantitas dikarenakan program yang menampung anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dikeluarkan dari program rutin SKPD. Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA OPD adalah sebagai berikut :

Tabel TC.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2021  
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	Program Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Terlaksananya administrasi perkantoran	1 Tahun	1,422,134	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas kesehatan	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	90%	1,927,685	
								Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	90%		
1.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Kelancaran adm surat menyurat	1 Tahun	3,844	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Dinas kesehatan	Persentase kegiatan administrasi kantor (surat, ATK, cetak/ penggandaan) yang dikelola sesuai rencana	100%	84,001	
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	65,000						
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	Kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	55,619						
1.4	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Kelancaran aktifitas kantor	1 Tahun	64,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas kesehatan	Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	582,750	
1.7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	Kelancaran pengelolaan adm keuangan dinkes	1 Tahun	170,100	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Dinas kesehatan	Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	682,500	
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	Kebersihan kantor terjaga	1 Tahun	32,932	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas kesehatan	Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	4,200	

No.	Rancangan Awal RKP0					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	4,400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas kesehatan	Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	10,500	
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran kegiatan kantor	1 Tahun	133,000						
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Kelancaran kegiatan kantor	1 Tahun	17,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas kesehatan	Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	10,500	
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	175,740	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas kesehatan	Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	238,235	
1.13	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	367,000	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas kesehatan	Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	100%	315,000	
1.14	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	333,500						
2	<b>Program Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	Dinas Kesehatan	<b>Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>473,972</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Dinas kesehatan	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>90%</b>	<b>24,841,215</b>	
2.15	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Dinas Kesehatan	KLB tertangani kurang dari 24 jam	1 Tahun	-	Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/ operasional	Dinas kesehatan	Persentase pengadaan kendaraan dinas sesuai rencana	100%	2,730,000	

Rancangan Awal RKP0						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-	Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	Dinas kesehatan	Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana	100%	233,100	
2.17	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Tersedianya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	1 Tahun	175,000						
2.18	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	Keamanan & Kenyamanan kerja	1 Tahun	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumdin	Dinas kesehatan	Persentase jasa pemeliharaan gedung dan sarpras dilaksanakan sesuai rencana	100%	162,750	
2.19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	213,972	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	Dinas kesehatan	Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	305,885	
2.20	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	25,000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Dinas kesehatan	Persentase jasa pemeliharaan mebeleur, peralatan dan perlengkapan	100%	42,000	
2.21	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	60,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarpras penunjang gedung kantor, rumah jabatan & rumah dinas	Dinas kesehatan	Persentase pembangunan/ renovasi/ rehab gedung dan sarpras sesuai rencana	100%	21,367,500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Dinas Kesehatan	Kenyamanan kerja	1 Tahun	5,000	Program Peningkatan disiplin Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas kesehatan	Prosentase ASN bidang kesehatan lulus pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan sesuai rencana	100%	518,700	
								Persentase pejabat fungsional memenuhi angka kredit	100%		
3.22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	5,000	Pengadaan Pakaian Dinas	Dinas kesehatan	Jumlah pegawai yg mendapatkan pakaian dinas	100 Org	-	
4	Program Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan	-	1 Tahun	593,902						
4.23	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya	1 Tahun	44,620	Bimtek / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan teknis Renbutnakes dan SISDMK	31 Org	72,450	
4.24	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Kesehatan	SDM kesehatan yang berkompeter	1 Tahun	350,000	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN	Dinas kesehatan	Jumlah program dokter internship	3 angk	446,250	
4.25	Registrasi dan akreditasi Nakes	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya hak tenaga fungsional	1 Tahun	141,802			Jumlah nakes teladan dibina	7 orang		
4.26	Penilaian Nakes Teladan	Dinas Kesehatan	Peningkatan motivasi & prestasi kerja petugas	1 Tahun	57,480			Persentase pembinaan institusi diknakes	100%		

Rancangan Awal RKPĐ						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Jumlah ASN yg mengikuti diklat/workshop/seminar/lokakarya/ bimtek	35 orang		
								Jumlah uji kompetensi jabfung perawat dan perawat gigi	2 kali		
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	230,000	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas kesehatan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	95%	420,000	
5.27	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Terukurnya kinerja kegiatan	1 Tahun	70,000	Penyus laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah	3 dokumen	210,000	
5.28	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Dinas Kesehatan	Tersusunnya renstra dan renja SKPD	1 Tahun	10,000			Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen		
								Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	5 dokumen		
								Persentase rekomendasi penelitian yang diterbitkan	100%		
								Jumlah aplikasi perencanaan dan pelaporan dikelola	13 aplikasi		
								Jumlah kegiatan manajemen BOK yang dilaksanakan sesuai rencana	11 keg		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.29	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Kesehatan	Meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan OPD	1 Tahun	60,000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Dinas kesehatan	Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan	100%	210,000	
5.3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas Kesehatan	Meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan OPD	1 Tahun	90,000			Persentase dokumen laporan keuangan diselesaikan tepat waktu	100%		
<b>6</b>	<b>Program Upaya Kesehatan</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	<b>46,817,242</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Dinas kesehatan	Persentase K4	90%	<b>14,387,797</b>	
								Persentase persalinan oleh nakes	98%		
								Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	100%		
								Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	59%		
								Persentase peserta KB aktif	74%		
								Persentase gizi buruk mendapat perawatan	100%		
								Persentase rumah tangga ber-PHBS	80%		
								Persentase sekolah tingkat dasar ber-PHBS	71%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase Pondok Pesantren yang Ber-PHBS	70%		
								Persentase Posyandu PURI	75%		
								Persentase Desa Siaga Aktif	100%		
								Persentase penduduk yang akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	90%		
								Persentase pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas	80%		
6.31	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Dinas Kesehatan	Tersedianya obat dan alat kesehatan	1 Tahun	3,247,125	Perbaikan gizi masyarakat	Dinas kesehatan	Persentase bayi BBLR	<5 %	917,976	
								Persentase balita BGM	< 1 %		
								Persentase bumil KEK	< 21,1 %		
6.32	Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (jam kesda non maskin)	Dinas Kesehatan	peningkatan kinerja puskesmas, pemantapan implementasi SPM	1 Tahun	-	Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	Dinas kesehatan	Persentase Kunjungan minimal 4x pd Bumil dgn frekuensi 1-1-2	95%	5,255,131	
6.33	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	Dinas Kesehatan	Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus	1 Tahun	-			Persentase bumil komplikasi ditangani	<20%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
6.34	Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Dinas Kesehatan	Tercukupinya biaya operasional pelayanan kesehatan di labkesda	1 Tahun	260,000			Persentase neonatus komplikasi ditangani	<15%		
6.35	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dinas Kesehatan	Peningkatan cakupan KIA (K, K4, Ibu nifas, KN)	1 Tahun	2,396,125			Persentase persalinan ditolong oleh Nakes yg kompeten	97%		
6.36	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (BOK)	Dinas Kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan UKM	1 Tahun	7,636,000			Persentase murid SD dilakukan perjaringan kesehatan	100%		
								Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	57%		
								Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	69%		
6.37	Operasional dan pemeliharaan Depo Farmasi dan Alkes	Dinas Kesehatan		1 Tahun	65,000	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesh olahraga.	Dinas kesehatan	Persentase rumah tangga yang akses jamban sehat	87%	6,585,443	
6.38	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan BLUD puskesmas	Dinas Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar	1 Tahun	33,212,992			Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	85%		
								Persentase rumah tangga dibina dan memenuhi syarat	75%		
								Persentase TTU memenuhi syarat	63%		
								Persentase TPM memenuhi syarat	45%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase desa/kel ODF	70%		
								Persentase desa/kel melaksanakan STBM	80%		
								Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%		
								Persentase pekerja informal yang mendapatkan konseling	35%		
								Persentase kelompok kesehatan kerja yang diberikan penyuluhan promotif dan preventif	35%		
								Persentase club olahraga yang dibina	35%		
								Persentase anak sekolah (kelas 4-6 SD) yang diukur kebugaran	30%		

Rancangan Awal RKP0						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
						Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pengembangan UKBM	Dinas kesehatan	Persentase rumah tangga dikaji	20%	1,629,248		
									Persentase sekolah pendidikan dasar yang diberi penyuluhan kesehatan			100%
									Persentase pondok pesantren yang diberi penyuluhan kesehatan			70%
									Persentase kader posyandu dibina			100%
									Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya			85%
									Persentase kader desa siaga yang dibina			85%
<b>7</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	7,626,000							
7.39	Penanggulangan KEP, anemi gizi besi, GAKY, KVA dan gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan	Gizi buruk yang tertangani	1 Tahun	7,626,000							
7.40	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar	Dinas Kesehatan	Bumil KEK tertangani, Pemberian MP-ASI	1 Tahun	-							

Rancangan Awal RKP0						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
8	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	196,460						
8.41	Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan peningkatan Peran Serta Masyarakat	Dinas Kesehatan	Desa siaga aktif	1 Tahun	196,460						
9	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	8,394,000						
9.42	Peningkatan sanitasi dasar, Pengawasan kualitas air bersih dan limbah rumah tangga	Dinas Kesehatan	Cakupan jamban keluarga	1 Tahun	8,394,000						
9.43	Peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	Dinas Kesehatan	Persentase petugas puskesmas dilatih tentang tentang kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	1 Tahun	-						
10	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	3,344,015	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	Dinas kesehatan	Persentase penderita HIV/AIDS mendapat ARV	78%	5,122,461	
								Succes rate pasien TB paru	90%		
								Insiden rate Penyakit DBD	<47 per 100.000 pddk		
								RFT rate kasus kusta	PB 100% MB 95%		

Rancangan Awal RKP0						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Cakupan Penderita Hipertensi diobati	30%		
								Cakupan Penderita Diabetes diobati	30%		
								Persentase pasien ODGJ pasung diobati	100%		
								Persentase KLB ditangani <24 jam	100%		
								Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%		
								Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	93%		
10.44	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	Penemuan dan penanganan kasus, prevalensi dan insiden penyakit	1 Tahun	2,690,965	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas kesehatan	Prevalensi penyakit HIV/AIDS	<0.5 per 10.000 pddk	3,681,782	
								Insiden rate Penyakit TB paru	303 kasus per 100.000 penduduk		
								Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%		
								Prevalensi penyakit Kusta	<5 per 10.000 penduduk		
								Angka Kejadian Malaria (API)	< 1 per 1 000 pddk		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase Penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis	100%		
								Persentase Penemuan dan pengobatan kasus filariasis	100%		
								Persentase Penemuan dan pengobatan pneumonia balita	90%		
								Persentase Penemuan dan pengobatan kasus diare	100%		
10.45	Peningkatan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Cakupan desa UCI	1 Tahun	-	Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	Dinas kesehatan	Jumlah penyakit potensial KLB	23 peny	899,614	
10.46	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan	KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah	1 Tahun	653,050			Jumlah penemuan kasus bukan campak pada populasi	18 kasus		
								Jumlah penemuan kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun	5 kasus		
								Persentase pemeriksaan kesehatan CJH	100%		
								Cakupan Imunisasi Hb0	95%		
								Cakupan Imunisasi BCG	95%		
								Cakupan Imunisasi Polio	95%		
								Cakupan Imunisasi DPT-HB	95%		

Rancangan Awal RKP0						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Cakupan imunisasi MR	95%		
								Cakupan imunisasi baduta	80%		
								Cakupan BIAS	95%		
								Cakupan TT WUS	30%		
10.47	Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	Dinas Kesehatan	Penemuan dan penanganan kasus PTM	1 Tahun	-	Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Persentase desa yg melaksanakan posbindu PTM	75%	541,065	
10.48	Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Cakupan pasien jiwa ditemukan dan dirawat	1 Tahun	-			Jumlah kader posbindu dilatih	200 kader		
								Jumlah petugas kesehatan yang diberi sosialisasi tentang IVA	62 orang		
								Jumlah PAUD dan TK diperiksa kesehatan gigi dan mulut	100 unit		
								Jumlah penemuan suspek katarak	200 pasien		
								Persentase pasien ODGJ pasung dikunjungi	100%		
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	5,291,001	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	75%	1,940,820	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
11.49	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Tercap kinerja puskesmas, terlaks. prog CHN, tersusunnya SOP dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan data yg valid	1 Tahun	4,000,705						
11.50	Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya	Dinas Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	1 Tahun	1,290,296	Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya	Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi	100%	1,940,820	
<b>12</b>	<b>Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	9,050,000						
12.51	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Kualitas dan jangkauan pelayanan	1 Tahun	-						
12.52	Rehabilitasi sedang / berat puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Terehabnya puskesmas dan jaringannya shg memenuhi standar	1 Tahun	-						
12.53	Rehabilitasi dan atau perluasan puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Terehabnya unit sarana pelayanan kesehatan sehingga kenyamanan dan keamanan pelayanan terwujud	1 Tahun	9,050,000						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
13	<b>Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	79,500						
13.54	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan usia dan pra-usia meningkat	1 Tahun	79,500						
14	<b>Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	3,918,261	<b>Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	Dinas kesehatan	<b>Persentase Puskesmas dengan hasil capaian KBPKP 95 %</b>	85%	16,842,000	
14.55	Kemitraan Asuransi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	1 Tahun	3,918,261	Kemitraan Asuransi Kesehatan	Dinas kesehatan	Persentase peserta PBID yang dibayarkan preminya	100%	16,842,000	
15	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran AKPER</b>	Dinas Kesehatan		1 Tahun	300,000			Persentase Puskesmas dengan Angka Kontak aman	10%		
15.56	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan		1 Tahun	300,000			Persentase Puskesmas dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik aman	100%		
15.57	Peningkatan kinerja mahasiswa melalui praktek lap, penelitian & pengabdian masyarakat	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-			Persentase Puskesmas dengan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung aman	80%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
16	Program peningkatan mutu dan pelayanan BLUD AKPER	Dinas Kesehatan		1 Tahun	2,912,525						
16.58	Operasional BLUD AKPER	Dinas Kesehatan	Terselenggara-nya operasional pendidikan di AKPER	1 Tahun	2,912,525						
17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Persentase kegiatan pendukung DBHCHT dilaksanakan sesuai rencana	100%	5,188,302	
17.59	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	1 Tahun		- Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	Dinas kesehatan	Persentase gedung dan sarana prasarana kesehatan dikelola sesuai rencana	100%	3,699,749	
						Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif / rehabilitative	Dinas kesehatan	Persentase kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif / rehabilitatif dilaksanakan sesuai rencana	100%	977,135	
						Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS	Dinas kesehatan	Persentase diklat, bimtek, workshop dilaksanakan sesuai rencana	100%	511,418	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
18	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan	Persentase Puskesmas dengan nilai pemantauan standar 80%	100%	12,194,938	
								% klinik yang mendapat rekomendasi ijin operasional	100%		
								% unit layanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar - Puskesmas - Rumah Sakit	100%		
								% Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	100%		
								Persentase Klinik Tradisional yang terstandar	30%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
18.60	Peningkatan mutu kesehatan tradisional dan komplementer.	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina	1 Tahun	-	Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Dinas Kesehatan	Persentase pemegang program Puskesmas yang mendapat sosialisasi tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	100%	110,040	
								Persentase Puskesmas/ Penyehat Tradisional yang dibina	100%		
								Persentase hatra yang memiliki STPT	3%		
						Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	Dinas kesehatan	Persentase Puskesmas yang dievaluasi	100%		11,458,206
								Persentase Puskesmas dengan hasil penilaian kinerja cukup	90%		
								Persentase klinik yang mengajukan ijin operasional dengan kondisi standar	100%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Dinas kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	80%	626,693	
								Persentase puskesmas yg memiliki tim krisis kesehatan	64%		
								Jumlah RS yg melakukan akreditasi versi 2012	6 RS		
								Persentase pelaporan krisis kesehatan dengan form RHA	90%		
								Jumlah tim ambulan desa siaga tersosialisasi Bantuan Hidup Dasar	50 Tim		
								Jumlah laboratorium yg melakukan perpanjangan ijin operasional	2 Lab		
								Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 Lab		
								Persentase kantong darah tersedia di PMI per jumlah penduduk	2%		

No.	Rancangan Awal RKP0					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
19	Program kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan makanan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	10,871,075	Program kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan makanan	Dinas kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP puskesmas sesuai rencana	100%	12,226,888	
							Persentase alkes terkalibrasi sesuai rencana	100%			
							Persentase ketersediaan alkes puskesmas	70%			
							Prosentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%			
19.61	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan obat dan BHP	1 Tahun	7,482,625	Kegiatan Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase jumlah dan jenis obat, BMHP sesuai rencana	100%	5,061,796	
19.62	Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	Tercukupinya distribusi obat secara merata	1 Tahun	112,900						
19.63	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan alkes di puskesmas	1 Tahun	3,247,125	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di fasilitas yankes	Dinas Kesehatan	Persentase Alkes yang Terkalibrasi sesuai rencana	100%	7,065,867	
							Jumlah penyediaan alkes sesuai rencana	180 item			
19.64	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya sertifikat SPKP dan SPP-IRT	1 Tahun	28,425	Peningkatan mutu dan keamanan	Dinas Kesehatan	Jumlah SPKP yang diterbitkan	150 sertifikat	99,225	
							Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan	100%			

No.	Rancangan Awal RKP0					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						Program Yankes pada UPT	UPT	Persentase UPT memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	71,999,981	
						Penyelenggaraan BOK UKM	Dinas kesehatan	Persentase kegiatan promotif preventif dilaksanakan sesuai rencana	100%	2,965,229	
						Penyelenggaraan pelayanan Labkesda	Labkesda	% kegiatan pelayanan labkesda dilaksanakan sesuai rencana	100%	210,000	
						Penyelenggaraan pelayanan Gudang Farmasi	IFK	% kegiatan GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	152,093	
						Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	Puskesmas	Persentase kegiatan BLUD dilaksanakan sesuai rencana	100%	46,043,060	
						Penyelenggaraan BOK Puskesmas	Puskesmas	Persentase kegiatan BOK Puskesmas dilaksanakan sesuai rencana	100%	22,629,600	

## **2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam konteks penyusunan rencana kerja OPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memacu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, OPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Program Kegiatan dalam Renja 2021 telah mengakomodir usulan/masukan masyarakat, era NEW NORMAL dan telah sesuai dengan Program dalam Renstra OPD serta telah mampu mendukung capaian kinerja sasaran OPD.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Upaya Kesehatan Masyarakat				
	a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pengembangan UKBM	Desa	Persentase posyandu balita ditingkatkan kualitas layanannya	11 Posyandu	Bantuan Operasional, sarana prasarana
	b. Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	Desa	Persentase posyandu lansia ditingkatkan kualitas layanannya	3 Posyandu	Bantuan Operasional, sarana prasarana
2	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan				
	a. Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Desa	1) Jumlah pengadaan ambulans desa	12 unit	Ambulan Siaga Desa
			2) Jumlah RS dibangun	1 RS	Pembangunan Rumah Sakit Type D
	b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	Desa	Jumlah bangunan ponkesdes direhab	2 sarana	Rehabilitasi gedung ponkesdes

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah “Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta” dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Strategi pembangunan kesehatan nasional sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan misi Bupati ke-7 yaitu “Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian” menetapkan **Tujuan** yaitu “*Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.*”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan program prioritas nasional maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menambahkan prevalensi balita stunting sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
  - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - c. Persentase balita gizi buruk
  - d. Prevalensi balita stunting
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - b. Persentase puskesmas terakreditasi
  - c. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
  - a. CFR HIV/AIDS
  - b. CFR TB paru per 100.000 penduduk
  - c. Persentase Desa Bebas DBD
  - d. Proporsi penderita kusta anak
  - e. Persentase pasien ODGJ bebas pasung
  - f. Persentase Desa UCI

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja tahun 2021 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Sasaran Kesatu - Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
  - a. Perbaikan gizi masyarakat
  - b. Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)
  - c. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
  - d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pengembangan UKBM

### **Sasaran Kedua - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi kegiatan :
  - a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
2. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan :
  - a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer
  - b. Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan
  - c. Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan :
  - a. Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya
4. Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
  - b. Bimbingan teknis / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan
  - c. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN
4. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan, meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
  - b. Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di Fasyankes
  - c. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

### **Sasaran Ketiga - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa**

Untuk mencapai sasaran Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, meliputi kegiatan :
  - a. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - b. Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi
  - c. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa

Disamping itu untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga direncanakan beberapa program dan kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan.
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan.
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - g. Penyediaan makanan dan minuman.
  - h. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/ operasional.
  - b. Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas.
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas.
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional
  - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas.
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
  - a. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
  - b. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitative.
  - c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS.
5. Program Pelayanan Kesehatan pada UPT
  - a. Penyelenggaraan BLUD puskesmas.
  - b. Penyelenggaraan BOK puskesmas
  - c. Penyelenggaraan BOK UKM
  - c. Penyelenggaraan pelayanan Labkesda
  - d. Penyelenggaraan pelayanan Gudang Farmasi

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja dibiayai dari sumber dana PAD murni, DAU, Pajak Rokok, DBHCHT, DAK dan Bantuan Keuangan (BK) Provinsi.

**Tabel TC.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Bidang Kesehatan</b>								
<b>1.02.1.02.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>1,927,685,013</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>2,024,069,264</b>
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat, ATK, cetak/penggandaan) yang dikelola sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	84,000,513	APBD II		100%	88,200,539
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	b) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	582,750,000	APBD II		100%	611,887,500
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	c) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	682,500,000	APBD II		100%	716,625,000
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	d) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	4,200,000	APBD II		100%	4,410,000
1.02.1.02.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	e) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	10,500,000	APBD II		100%	11,025,000
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	f) Jumlah media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan	100%	10,500,000	APBD II		100%	11,025,000
1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	g) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan	100%	238,234,500	APBD II		100%	250,146,225

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Cutcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.1.02.01.01.14	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	h) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan	100%	315,000,000	APBD II		100%	330,750,000
<b>1.02.1.02.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>24,841,215,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>26,083,275,750</b>
1.02.1.02.01.02.03	Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas / operasional	a) Persentase pengadaan kendaraan dinas sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	2,730,000,000	APBD II		100%	2,866,500,000
1.02.1.02.01.02.04	Pengadaan peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga	b) Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	233,100,000	APBD II		100%	244,755,000
1.02.1.02.01.02.07	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor	c) Persentase jasa pemeliharaan gedung dan sarpras dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	162,750,000	APBD II		100%	170,887,500
1.02.1.02.01.02.08	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	d) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	305,865,000	APBD II		100%	321,158,250
1.02.1.02.01.02.23	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur, peralatan & perlengkapan gedung kantor	e) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur, peralatan dan perlengkapan dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	42,000,000	APBD II		100%	44,100,000
1.02.1.02.01.02.11	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	f) Persentase pembangunan/renovasi/rehab gedung dan sarpras sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	21,367,500,000	APBD II		100%	22,435,875,000
<b>1.02.1.02.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>518,700,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>544,635,000</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.1.02.01.03.08	Bimbingan teknis / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan	Jml tenaga yang mengikuti Bimbingan teknis Renbu/nakes dan SISDMK	Dinas Kesehatan	100%	72,450,000	APBD II		100%	76,072,500
1.02.1.02.01.03.11	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN	a) Jml program dokter internship b) Jml nakes teladan dibina c) % pembinaan institusi diknakes d) Jml ASN yg mengikuti diklat/workshop/ seminar/ lokakarya/ bimtek e) % pejabat fungsional memenuhi angka kredit f) Jml uji kompetensi jabfung perawat dan perawat gigi	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	446,250,000	APBD II		100%	468,562,500
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Dinas Kesehatan	100%	420,000,000	APBD II		100%	441,000,000
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	a) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah b) Jumlah dokumen perencanaan c) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan d) Jumlah surat ijin penelitian yang diterbitkan e) Jumlah aplikasi perencanaan dan pelaporan dikelola	Dinas Kesehatan	100%	210,000,000	APBD II		100%	220,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.1.02.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran / prognosis realisasi anggaran dan akhir tahun	a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan b) Persentase dokumen laporan keuangan diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan	100%	210,000,000	APBD II		100%	220,500,000
<b>1.02.1.02.01.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>14,387,797,200</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>15,107,187,060</b>
1.02.1.02.01.16.05	Perbaikan gizi masyarakat	a) Persentase bayi BBLR b) Persentase balita BGM c) Persentase bumil KEK	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	917,975,625	APBD II		100%	963,874,406
1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	a) Persentase Kunjungan minimal 4x pd Bumil dgn frekuensi 1-1-2 b) Persentase bumil komplikasi ditangani c) Persentase neonatus komplikasi ditangani d) Persentase persalinan ditolong oleh Nakes yg kompeten e) Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan f) Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan g) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	5,255,130,825	APBD II		100%	5,517,887,365
1.02.1.02.01.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	a) Persentase rumah tangga yang akses jamban sehat b) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	6,585,442,500	APBD II		100%	6,914,714,625

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		c) Persentase rumah tangga dibina dan memenuhi syarat	Dinas Kesehatan						
		d) Persentase TTU memenuhi syarat	Dinas Kesehatan						
		e) Persentase TPM memenuhi syarat	Dinas Kesehatan						
		f) Persentase desa/kel ODF	Dinas Kesehatan						
		g) Persentase desa/kel melaksanakan STBM	Dinas Kesehatan						
		h) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	Dinas Kesehatan						
		i) Persentase pekerja informal yang mendapatkan konseling	Dinas Kesehatan						
		j) Persentase kelompok kesehatan kerja yang diberikan penyuluhan promotif dan preventif	Dinas Kesehatan						
		k) Persentase club olahraga yang dibina	Dinas Kesehatan						
		l) Persentase pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah (kelas 4-6 SD)	Dinas Kesehatan						
1.02.1.02.01.16.26	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Pengembangan UKBM	a) Persentase rumah tangga dikaji	Dinas Kesehatan	100%	1,629,248,250	APBD II		100%	1,710,710,663
		b) Persentase Penyuluhan kesehatan di Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar	Dinas Kesehatan						
		c) Persentase Penyuluhan kesehatan di pondok pesantren	Dinas Kesehatan						
		d) Persentase kader posyandu dibina	Dinas Kesehatan						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	Dinas Kesehatan						
		f) Persentase kader desa siaga yang dibina	Dinas Kesehatan						
<b>1.02.1.02.01.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>5,122,488,404</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>5,378,612,824</b>
1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	a) Persentase penderita HIV/AIDS mendapat ARV	Dinas Kesehatan	100%	3,681,782,396	APBD II		100%	3,865,871,516
		b) Succes rate pasien TB paru	Dinas Kesehatan						
		c) CFR DBD	Dinas Kesehatan						
		d) RFT rate kasus kusta	Dinas Kesehatan						
		e) Angka Kejadian Malaria (API)	Dinas Kesehatan						
		f) Persentase Penemuan dan pengobatan kasus leptosprosis	Dinas Kesehatan						
		g) Persentase Penemuan dan pengobatan kasus filariasis	Dinas Kesehatan						
		h) Persentase Penemuan dan pengobatan pneumonia balita	Dinas Kesehatan						
		i) Persentase Penemuan dan pengobatan kasus diare	Dinas Kesehatan						
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	Dinas Kesehatan	100%	899,641,008	APBD II		100%	944,623,058
		b) Jml penemuan kasus bukan campak pada populasi	Dinas Kesehatan						
		c) Jml penemuan kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun	Dinas Kesehatan						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		d) % pemeriksaan kesehatan CJH	Dinas Kesehatan						
		e) % Imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan						
		f) Cakupan imunisasi baduta	Dinas Kesehatan						
		g) Cakupan BIAS	Dinas Kesehatan						
		h) Cakupan TT WUS	Dinas Kesehatan						
1.02.1.02.01.22.12	Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa	a) Persentase desa yg melaksanakan posbindu PTM	Dinas Kesehatan	100%	541,065,000	APBD II		100%	568,118,250
		b) Jml kader posbindu dilatih	Dinas Kesehatan						
		c) Jml petugas kesehatan yang diberi sosialisasi tentang IVA	Dinas Kesehatan						
		d) Jml PAUD dan TK diperiksa kesehatan gigi dan mulut	Dinas Kesehatan						
		e) Jumlah penemuan suspek katarak	Dinas Kesehatan						
		f) Persentase pasien ODGJ pasung dikunjungi	Dinas Kesehatan						
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan	100%	1,940,820,000	APBD II		100%	2,037,861,000
1.02.1.02.01.23.08	Akreditasi Puskesmas	Persentase puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	100%	1,940,820,000	APBD II	(DAK Non Fisik)		2,037,861,000
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan	100%	16,842,000,000	APBD II		100%	17,684,100,000
1.02.1.02.01.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	a) Persentase peserta PBID yang dibayarkan premi nya	Dinas Kesehatan	100%	16,842,000,000	APBD II		100%	17,684,100,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		b) Persentase Puskesmas dengan Angka Kontak aman c) Persentase Puskesmas dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik aman d) Persentase Puskesmas dengan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung aman	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan						
<b>1.02.1.02.01.37</b>	<b>Pembinaan Lingkungan Sosial</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>5,188,302,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>5,447,717,100</b>
1.02.1.02.01.37.02	Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dgn BPJS	a) Persentase gedung dan sarana/prasarana kesehatan dikelola sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	3,699,748,500	APBD II		100%	3,884,735,925
1.02.1.02.01.37.03	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif	b) Persentase kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	977,135,250	APBD II		100%	1,025,992,013
1.02.1.02.01.37.04	Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS	c) Persentase diklat, bimtek, workshop dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	511,418,250	APBD II		100%	536,989,163
<b>1.02.1.02.01.39</b>	<b>Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>12,194,938,174</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>12,804,685,082</b>
1.02.1.02.01.39.03	Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	a) % puskesmas yang melaksanakan penugasan b) % puskesmas yg memiliki tim krisis kesehatan c) JmlRS yg melakukan akreditasi versi 2012	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	626,692,500	APBD II		100%	658,027,125

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		d) % pelaporan krisis kesehatan dengan form RHA	Dinas Kesehatan						
		e) Jml tim ambulan desa siaga tersosialisasi Bantuan Hidup Dasar	Dinas Kesehatan						
		f) Jml laboratorium yg melakukan perpanjangan ijin operasional	Dinas Kesehatan						
		Jumlah laboratorium yang terakreditasi	Dinas Kesehatan						
		g) % kantong darah tersedia di PMI per jml penduduk	Dinas Kesehatan						
1.02.1.02.01.39.05	Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer	a) Persentase pemegang program Puskesmas yang mendapat sosialisasi tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	100%	110,040,000	APBD II		115,542,000	
		b) Persentase Puskesmas/Penyehat Tradisional yang dibina	Dinas Kesehatan						
		c) Persentase hatra yang memiliki STPT	Dinas Kesehatan						
1.02.1.02.01.39.06	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	a) Persentase Puskesmas yang devaluasi	Dinas Kesehatan	100%	11,458,205,674	APBD II		12,031,115,957	
		b) Persentase Puskesmas dengan hasil penilaian kinerja cukup	Dinas Kesehatan						
		c) Persentase klinik yang mengajukan ijin operasional dengan kondisi standar	Dinas Kesehatan						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.1.02.01.40	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan		Dinas Kesehatan	100%	12,226,887,481	APBD II		100%	12,838,231,855
1.02.1.02.01.40.01	Kegiatan Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase jumlah dan jenis obat, BMHP sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	5,061,795,631	APBD II		100%	5,314,885,413
1.02.1.02.01.40.03	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di Fasyankes	a) Persentase Alkes yang Terkalibrasi sesuai rencana b) Jumlah penyediaan alkes sesuai rencana	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	7,065,866,850	APBD II		100%	7,419,160,193
1.02.1.02.01.40.04	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	a) Jumlah SPKP yang diterbitkan b) Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	99,225,000	APBD II		100%	104,186,250
1.02.1.02.01.41	Program Pelayanan Kesehatan pada UPT		Dinas Kesehatan	100%	71,999,981,142	APBD II		100%	75,599,980,199
1.02.1.02.01.41.01-3	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	Persentase kegiatan BLUD dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	46,043,059,766.98	APBD II		100%	48,345,212,755
1.02.1.02.01.41.32-4	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	Persentase kegiatan BOK Puskesmas dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	22,629,600,000	APBD II		100%	23,761,080,000
1.02.1.02.01.41.63	Penyelenggaraan BOK UKM	Persentase kegiatan promotif preventif dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	2,965,228,875	APBD II		100%	3,113,490,319
1.02.1.02.01.41.64	Penyelenggaraan pelayanan Labkesda	Persentase kegiatan pelayanan labkesda dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	210,000,000	APBD II		100%	220,500,000
1.02.1.02.01.41.65	Penyelenggaraan pelayanan Gudang Farmasi	Persentase kegiatan gudang farmas dilaksanakan sesuai rencana	Dinas Kesehatan	100%	152,092,500	APBD II		100%	159,697,125
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>167,610,814,414.48</b>				<b>175,991,355,135.21</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran perangkat daerah yaitu (1) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan; dan (3) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, pada periode Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 telah ditetapkan program, kegiatan beserta alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dinas Kesehatan beserta Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yaitu 31 puskesmas, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan Laboratorium Kesehatan Daerah dibantu oleh UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, poskestren, desa siaga, poskesdes dan polindes selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan mutu dan akses sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan terpenuhi yang digambarkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga tujuan pembangunan kesehatan bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Ponorogo.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kd_Tujuan	Tujuan	Kd_Sasaran	Sasaran	Kd_Program	Program	Pagu Program 2021 (e-Planning)	Pagu Program 2021 (Penyesuaian)	Kd_Kegi-atan	Kegiatan	Pagu Kegiatan 2021 (e-Planning)	Pagu Kegiatan 2021 (Penyesuaian)	SKPD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.1	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.02.1.02.01.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14,387,797,200	14,387,797,200	1.02.1.02.01.16.05	Perbaikan gizi masyarakat	917,975,625	917,975,625	Dinas Kesehatan				
								1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	5,255,130,825	5,255,130,825					
								1.02.1.02.01.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	6,585,442,500	6,585,442,500					
								1.02.1.02.01.16.25	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pengembangan UKBM	1,629,248,250	1,629,248,250					
		1.02.1.02.01.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1.02.1.02.01.28	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1.02.1.02.01.28	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	16,842,000,000	16,842,000,000	1.02.1.02.01.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	16,842,000,000	16,842,000,000	Dinas Kesehatan		
										1.02.1.02.01.39	Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	12,194,938,174	12,194,938,174			
				1.02.1.02.01.39.06	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	1.02.1.02.01.39.06	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	1.02.1.02.01.39.06	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	11,458,205,674	11,458,205,674	1.02.1.02.01.39.06	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer		11,458,205,674	11,458,205,674
												1.02.1.02.01.39.03	Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan		626,692,500	626,692,500
												1.02.1.02.01.39.05	Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer		110,040,000	110,040,000

Kd_Tujuan	Tujuan	Kd_Sasaran	Sasaran	Kd_Program	Program	Pagu Program 2021 (e-Planning)	Pagu Program 2021 (Penyesuaian)	Kd_Kegiatan	Kegiatan	Pagu Kegiatan 2021 (e-Planning)	Pagu Kegiatan 2021 (Penyesuaian)	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.02.1.02.01.03	Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	518,700,000	518,700,000	1.02.1.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas			
								1.02.1.02.01.03.08	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72,450,000	72,450,000	
								1.02.1.02.01.03.11	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN	446,250,000	446,250,000	
				1.02.1.02.01.40	Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	12,226,887,481	12,226,887,481	1.02.1.02.01.40.01	Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	5,061,795,631	5,061,795,631	
								1.02.1.02.01.40.03	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di Fasyankes	7,065,866,850	7,065,866,850	
								1.02.1.02.01.40.04	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	99,225,000	99,225,000	
		1.02.1.02.01-3	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa	1.02.1.02.01.22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5,122,488,404	5,122,488,404	1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3,681,782,396	3,681,782,396	Diras Kesehatan
								1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	899,641,008	899,641,008	
								1.02.1.02.01.22.12	Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa	541,065,000	541,065,000	

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2021, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai tujuan dan sasaran, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, 28 September 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PONOROGO



drg. Hj. RAHAYU KUSDARINI, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610510 198901 2 001